

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengawasan Internal

2.1.1.1 Pengertian Pengawasan Internal

Menurut Mulyadi (2018:163) Pengawasan Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan menurut Arens dalam Wahyuni (2018:78) pengawasan intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Romney dan Steinbart (2019 : 222) mendefinisikan pengawasan internal sebagai sebuah proses yang diimplementasikan oleh segenap direksi, manajemen, dan semua pegawai yang terkait dengan peraturan perusahaan setempat untuk menyajikan jaminan yang layak.

Pengawasan Internal menurut Peraturan Perusahaan Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjanto (2015:18) mendefinisikan pengawasan internal sebagai suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan asset perusahaan, mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.

Menurut *Committee of sponsoring* (COSO) dalam Boynton dan Johnson (2016:23), definisi dari pengawasan internal adalah sebuah proses yang dilakukan oleh direksi perusahaan dan pegawai lain untuk menyediakan keyakinan yang memadai mengenai hal hal berikut : (1) keadilan pelaporan keuangan. (2) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (3) efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa pengertian sistem pengendalian internal adalah serangkaian proses untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan di dalamsuatu perusahaan telah berjalan efektif dan efisien dan tidak ada prosedur yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan sehingga merugikan perusahaan dan menyebabkan tujuan jangka panjang perusahaan tidak dapat tercapai.

2.1.1.2 Tujuan Pengawasan Internal

Menurut Mulyadi (2018:163) tujuan sistem pengawasan internal adalah: (1)Menjaga kekayaan organisasi. (2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. (3) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. (4) Mendorong

dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, sistem pengawasan internal dibagi menjadi dua macam:

1. Pengawasan internal akuntansi (*internal accounting control*).

Merupakan bagian dari sistem pengawasan internal, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

2. Pengawasan internal administratif (*internal administrative control*).

Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Tunggal dalam Wahyuni (2018:78) terdapat 4 tujuan pengawasan internal, yaitu:

1. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi
2. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya
3. Untuk menggalakkan efisiensi usaha dan
4. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan.

2.1.1.3 Unsur-unsur Pengawasan Internal

Mulyadi (2018:164), menyatakan ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi untuk menciptakan pengendalian yang baik.

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, dalam perusahaan manufaktur misalnya, kegiatan

pokoknya adalah memproduksi dan menjual produk. Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut dibentuk departemen produksi, departemen pemasaran dan departemen keuangan dan umum. Departemen ini kemudian terbagi-bagi lebih lanjut menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut, oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat system yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Di pihak lain, formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan ketelitian dan keandalan yang tinggi. Dengan demikian system otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:
 - a. Penggunaan formulir bernomor urut bercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir merupakan alat yang memberikan otorisasi terlaksananya transaksi.

- b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal yang tidak teratur.
 - c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan orang atau unit organisasi lain.
4. Pegawai yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya Untuk mendapatkan pegawai yang kompeten, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Seleksi calon pegawai berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh pegawai yang mempunyai kecakapan sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya. Manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon pegawai yang menduduki jabatan tersebut.
 - b. Pengembangan pendidikan pegawai selama menjadi pegawai perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

2.1.1.4 Indikator Pengawasan Internal

Menurut Handoko (2016 : 363-365), Indikator pengawasan internal adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan

Menetapkan standar pelaksanaan yaitu menetapkan suatu satuan pengukuran yang akan digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil suatu pekerjaan.

2. Pengukuran hasil kerja

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kerja, yaitu melalui pengamatan, laporan lisan dan tertulis, inspeksi atau dengan pengambilan sampel.

3. Penilaian kinerja

Penilaian kinerja merupakan proses untuk menentukan tingkat perbedaan antara pelaksanaan kerja (hasil) yang dicapai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

4. Tindakan koreksi

Tindakan perbaikan atau koreksi dilaksanakan apabila dalam pelaksanaan kerja ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan yang harus segera diperbaiki. Melalui tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan, diharapkan hasil kerja sesuai dengan rencana.

2.1.2 Akuntansi sektor publik

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas perusahaan guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak

yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan perusahaan yang dimaksud dapat mencakup perusahaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Halim, 2014:20). Sektor publik adalah perusahaan dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Dengan demikian beralasan bahwa istilah sektor publik dapat berkonotasi perpajakan, birokrasi, atau perusahaan (Halim, 2014:9).

Menurut Mardiasmo (2019:29) dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan perusahaan daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus di operasikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Sektor Publik bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan historis yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang dan definisi. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan perusahaan, yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

2.1.2.2 Akuntansi Sektor Publik

Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Menurut Mardiasmo (2016:67) teori memiliki tiga karakteristik dasar yaitu : (1) kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (*the*

ability to explain), (2) kemampuan untuk memprediksi (*the ability to predict*), (3) kemampuan mengendalikan fenomena (*the ability to control given phenomena*).

Menurut Santoso (2018:20) Pada dasarnya terdapat tiga tujuan untuk mempelajari teori akuntansi yaitu: 1) untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini, 2) mempelajari kelemahan dan kekurangan dan praktik akuntansi yang saat ini dilakukan, dan 3) memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Pengembangan teori sektor publik untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan (*reliable*).

2.1.2.3 Indikator Akuntansi Sektor Publik

Menurut Kristiyani dan Hamidah (2020:300) indikator Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Publik

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang.

2. Penganggaran Publik

Penganggaran Publik Anggaran menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

3. Realisasi Anggaran Publik

Setelah proses penganggaran selesai, anggaran itu kemudian direalisasikan sebagaimana yang telah direncanakan organisasi publik. yang Dengan kata

lain, realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik.

4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan perusahaan dimaksudkan untuk mendapatkan barang/jasa dengan kriteria tepat harga, tepat (sesuai) kualitas, tepat kuantitas (volume), rekanan dan cara pengadaan yang tepat, dan kesepakatan lainnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sehingga pengguna dapat memanfaatkan barang/jasa dimaksud.

5. Pelaporan Keuangan Publik

Laporan keuangan digunakan untuk pertanggungjawaban kepada publik untuk mengetahui kinerja dan evaluasi dari manajemen, mengetahui pencapaian atas target yang sudah ditetapkan, membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis serta memungkinkan untuk pihak luar mengetahui biaya atas barang dan jasa yang telah diterima dan mengetahui efisiensi sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi.

6. Audit Sektor Publik

Audit sektor publik adalah proses audit yang ditujukan untuk memeriksa dan memvalidasi laporan keuangan yang dikurasi oleh perusahaan dan lembaga-lembaga negara.

7. Pertanggung Jawaban Publik

Suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk di dalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan.

2.1.2.4 Kendala Akuntansi Sektor Publik

Menurut Santoso (2018:20) untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialistik.

1. Objektivitas

Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi *stakeholder* organisasi.

2. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk rnenghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut.

3. Daya Banding

Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain sejenisnya. Dengan demikian daya banding berarti laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

4. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan.

5. Ekonomis dalam Penyajian Laporan

Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan dapat berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.

6. Materialitas

Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialitas memang bersifat pertimbangan subjektif (*subjective judgment*), namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi.

Menurut Santoso (2018:22) Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah

ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengawasan internal atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Penetapan standar akuntansi sangat diperlukan untuk memberikan jaminan dalam aspek konsistensi pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan.

Proses penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi sektor publik merupakan masalah yang serius bagi praktek akuntansi, profesi akuntan, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfaat bagi suatu pihak, namun dapat juga merugikan bagi pihak lain. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak-pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi sektor publik itu sendiri (Santoso, 2018:23).

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang menggambarkan tingkat pencapaian dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mewujudkan misi, visi, sasaran dan tujuan organisasi (Sumartono, 2017:9). Akuntabilitas Kinerja Perusahaan ialah suatu perwujudan kewajiban suatu perusahaan agar mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan tanggung jawab ini kemudian dipublikasikan dengan format laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Perusahaan (LAKIP).

2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas Kinerja

Menurut Santoso (2018:20) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perusahaan, harus berdasar pada indikator-indikator tertentu. Indikator kinerja menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang memberi gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu sasaran atau tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan memperhatikan:

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dan suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dan pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik bersifat positif maupun negatif, pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

2.2 Teori Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pengawasan Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja

Menurut Mulyadi (2018:163) Pengawasan Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dalam bekerja jika kegiatan keuangan dievaluasi dengan baik maka kinerja akuntansi perusahaan akan memiliki kinerja yang baik pula. Pengawasan sebagai salah satu bentuk dari kontrol merupakan bagian penting dari akuntabilitas. Akuntabilitas publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila ditunjang dengan mekanisme pengawasan yang baik (Supriyatno, 2009:235).

Menurut penelitian Bambang Pamungkas (2012) menunjukkan bahwa Dimensi pengawasan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja keuangan, meliputi : (1) standar hasil yang diinginkan; (2) laporan; (3) audit; dan (4) anggaran didominasi dengan jawaban positif, hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang tidak disajikan sesuai dengan standar akan tidak bermanfaat dan pengawasan keuangan yang menyandarkan kepada penerapan standar akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2.2.2 Hubungan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja

Akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas perusahaan guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan perusahaan yang

dimaksud dapat mencakup perusahaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Halim, 2014:20). Jika penerapatan akuntansi sektor publik dapat terlaksana dengan baik maka Akuntabilitas Kinerja akan meningkat.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefesiensikan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawaban publik (Indra Bastian, 2010:75).

Urip Santoso (2008) Penerapan Akuntansi Sektor Publik memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap akuntabilitas kinerja. Hal tersebut menunjukkan ketika semakin baik penerapan akuntansi sektor publiknya maka kinerjanya semakin dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal Volume, Nomor, Tahun	Variabel yang Diteliti Alat Analisis, Hasil Penelitian.	Persamaan	Perbedaan
1	Putri Wulan Sari	Pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Akuntansi. 2020	Variabel X Pengawasan Internal dan Akuntansi Sektor Publik variabel Y Kinerja Perusahaan. Alat analisis yang digunakan pengujian statistic menggunakan <i>software SmartPLS 2.0</i> . Akuntansi Sektor Publik meberikan pengaruh terhadap Kinerja perusahaan. Besar pengaruh akuntansi terhadap kinerja mencapai nilai Koefisien Determinasi 32,6% dan pengaruh tidak langsung Akuntansi sektor publik terhadap kinerja akibat adanya hubungan dengan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Variabel X yaitu Pengawasan Internal dan Akuntansi Sektor Publik ✓ Variabel Y Kinerja Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahun penelitian ✓ Tempat penelitian ✓ Tidak ada variabel intervening.

			internal sebesar 12,2% maka besar pengaruhnya 44,8, namun Pengaruhnya tidak mencapai 100% karena masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja yang peneliti tidak teliti.		
2	Arini Novandalina, Fidyah Yuli Ernawati	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Semarang. JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020	Variabel penelitian X akuntansi sektor publik dan pengawasan internal, variabel Y kualitas laporan keuangan. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal yang semakin tinggi, maka kualitas laporan keuangan semakin tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Variabel X yaitu Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan. ✓ Alat analisis 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahun penelitian ✓ Tempat penelitian ✓ Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan ✓ Variabel Z Akuntabilitas Kinerja Perusahaan
3	Bambang Pamungkas	Pengaruh Akuntansi Sektor Publik	Variabel penelitian X Akuntansi Sektor Publik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Variabel X yaitu Akuntansi Sektor 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahun penelitian ✓ Tempat penelitian

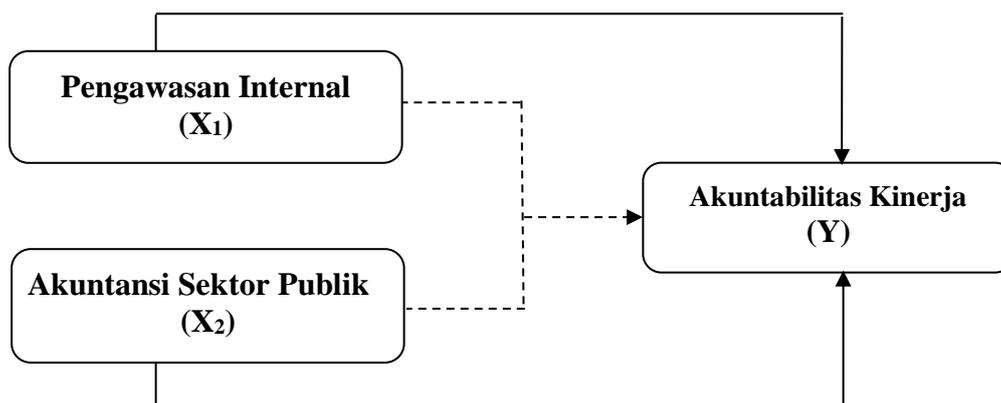
		<p>Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Perusahaan. Volume 12 No. 2, Oktober 2012</p>	<p>Dan Pengawasan, variabel Y Kualitas Laporan Keuangan variabel Z Akuntabilitas Kinerja Perusahaan. penelitian dilakukan dengan metode survey. Hasil analisis menunjukkan bahwa Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan baik secara parsial maupun simultan.</p> <p>Penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan perusahaan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja perusahaan baik secara parsial maupun simultan.</p>	<p>Publik Dan Pengawasan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan ✓ Variabel Z Akuntabilitas Kinerja Perusahaan ✓ Alat analisis
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	Carolus Floriantono Dengia, Ajis Salim Adang Djahab, Jusuf Lery Rupidara	Pengaruh Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Kpu Kota Kupang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 2 No. 2, Mei 2021	Variabel penelitian X Pengawasan, variabel Y Akuntabilitas KPU. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dan pengambilan sampel dilakukan menggunakan proportionate stratified random sampling terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Data primer diperoleh dari pengisian kuesioner oleh sampel sebanyak 20 (dua puluh) orang PPK dan 103 (seratus tiga) orang PPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Variabel X yaitu pengawasan Dan Akuntabilitas. ✓ Alat analisis 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahun penelitian ✓ Tempat penelitian
---	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

			KPU Kota Kupang. Secara keseluruhan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas KPU Kota Kupang.		
5	Shinta Pratiwi	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2019	Variabel penelitian X penerapan akuntansi sektor publik, variabel Y akuntabilitas kinerja instransi pemerintah. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda. Akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi. Penerapan akuntansi sektor publik memiliki hubungan erat yang kuat terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Variabel X yaitu penerapan akuntansi sektor publik Dan variabel Y akuntabilitas kinerja instransi pemerintah. ✓ Alat analisis 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahun penelitian ✓ Tempat penelitian

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada judul yang penulis ajukan yaitu maka variabel dependen yaitu Pengawasan Internal (X_1) dan Akuntansi Sektor Publik (X_2), variabel independen yaitu Akuntabilitas Kinerja (Y). Dengan demikian, kerangka berpikir dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Keterangan:

Secara Parsial —————
 Secara Simultan - - - - -

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Menurut Arikunto (2020:110) hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada Pengaruh Pengawasan Internal Dan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu secara Parsial maupun simultan.